

# Peran LKPP dalam Mewujudkan Percepatan Pembangunan

---

**Dr. Roni Dwi Susanto**

Kepala *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

*Government Procurement Procedures: 2019 Onward  
IndonesiaX – 12 th Quarterly Conference  
Jakarta, 25 Juni 2019*



# **PERAN PENGADAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KERANGKA PERPRES NO.16 TAHUN 2018**

**Pengadaan**

**Pembangunan**

- Peningkatan Pelayanan Publik
- Pengembangan Perekonomian Nasional dan Daerah

# PROFIL PENGADAAN NASIONAL

	2017	2018	2019
<b>Nilai Belanja</b> (APBN dan APBD)	<b>2.080,5 T</b>	<b>2.220,7 T</b>	<b>2.461,1 T</b>
<b>Jumlah Paket Pengadaan*</b> General Procurement Plan (Total Package)	<b>2.228.989</b>	<b>2.357.860</b>	<b>2.987.768**</b>

\* Data jumlah Paket Pengadaan berdasarkan Aplikasi Sirup terhadap APBN, APBD, BUMN dan BUMD

\*\* Data 2019 per tanggal 17 Juni 2019





# ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT 2018

**86.01%**  
dari total belanja  
barang/jasa 2018  
Melalui elektronik

**E-Tendering**  
**337,1**  
**Triliun**  
(116.650 Paket)

Total Transaksi  
melalui Elektronik  
Tahun 2018  
**391,9**  
**Triliun**

**13,99%**  
dari total belanja  
barang/jasa 2018  
Melalui elektronik

**E-Purchasing**  
**54,8**  
**Triliun**  
(375.021 Paket)

**37,7%**

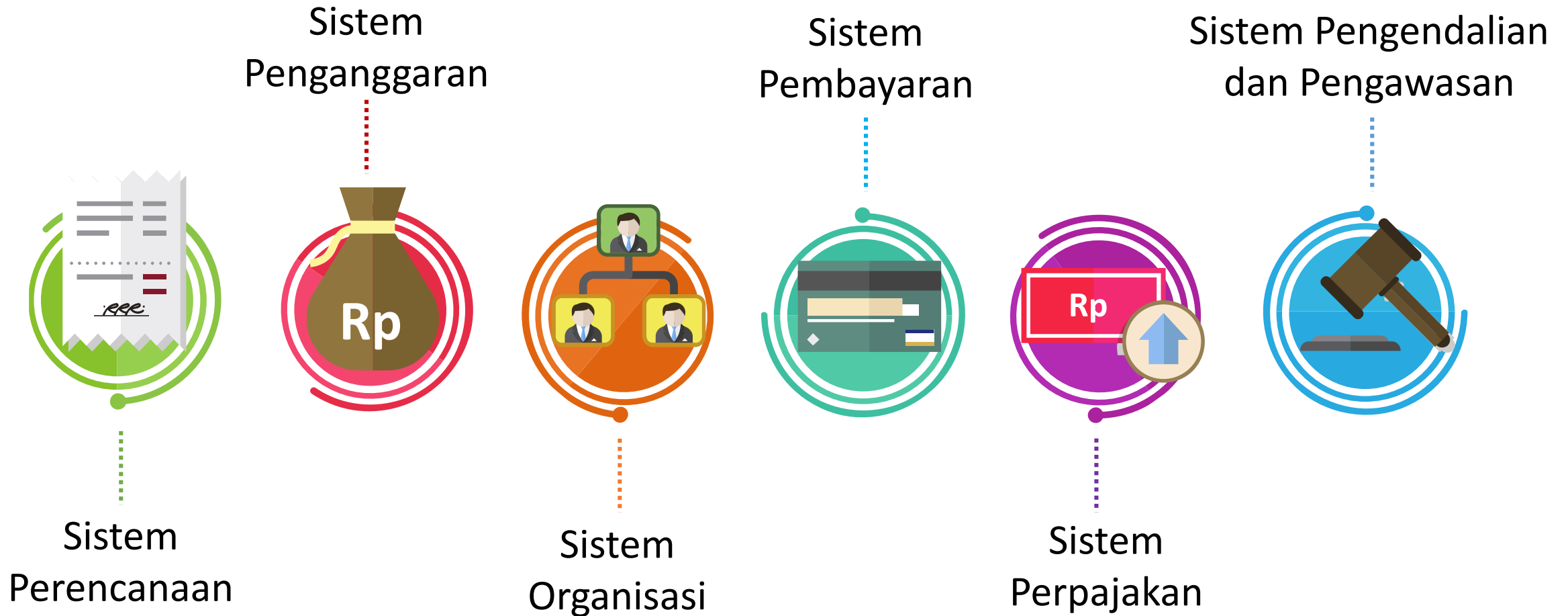
Dari total belanja  
barang/jasa 2018 sebesar Rp1.040 T

Akumulasi optimalisasi Anggaran Negara  
lebih dari **150 triliun rupiah** yang tercatat  
dalam sistem **E-procurement** dari 2015-2018

Selisih Pagu dan Hasil Lelang (Juta Rp)	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
	24.606.058	28.312.260	35.712.008	62.010.071


(Sumber : Smart Report LKPP dan Direktorat Pengembangan Sistem Katalog)

# EKOSISTEM PENGADAAN






# KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LKPP



## **KEDUDUKAN (PASAL 1 PERPRES No. 106/2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES No. 157/2014):**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.



## **TUGAS (PASAL 2 PERPRES No. 106/2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES No. 157/2014):**

Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan PBJP



# KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LKPP (2)

**FUNGSI (PASAL 3 PERPRES No. 106/2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES No. 157/2014):**

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang PBJP termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang PBJP ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan PBJP merintah secara elektronik (*electronic procurement*);
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

# STAKEHOLDER PENGADAAN





# PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA



## Peraturan Presiden

- **Nomor 16 Tahun 2018**, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Peraturan Lembaga



- **Nomor 7 Tahun 2018**, tentang Pedoman Perencanaan PBJP
- **Nomor 8 Tahun 2018**, tentang pedoman Swakelola
- **Nomor 9 Tahun 2018**, tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
- **Nomor 10 Tahun 2018**, tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/ Seleksi Internasional
- **Nomor 11 Tahun 2018**, tentang Katalog Elektronik
- **Nomor 12 Tahun 2018**, tentang Pedoman PBJ yang dikecualikan PBJP
- **Nomor 13 Tahun 2018**, tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat
- **Nomor 14 Tahun 2018**, tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa
- **Nomor 15 Tahun 2018**, tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
- **Nomor 16 Tahun 2018**, tentang Agen Pengadaan
- **Nomor 17 Tahun 2018**, tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PBJP
- **Nomor 18 Tahun 2018**, tentang Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP
- **Nomor 19 Tahun 2018**, tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan PBJ

# RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- PBJ di lingkungan K/L Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- PBJ yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau;
- PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.



**Peraturan Presiden  
No 16 Tahun 2018**

**Pasal 2**



# PERATURAN LAINNYA TERKAIT PBJ



## Peraturan Lainnya

- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012**  
Tentang Industri Pertahanan
- **Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015**  
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum
- **Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019**  
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- **Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 1 Tahun 2019**  
Tentang Tata Cara Pengadaan di Luar Negeri
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2018**  
Tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018**  
Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa
- **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018**  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

# PERATURAN LAINNYA TERKAIT PBJ (2)



## Peraturan Lainnya

- **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123/M-DAG/PER/12 Tahun 2015**  
Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui *Intrade* dalam Kerangka Indonesia National *Single Window*
- **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/12 Tahun 2016**  
Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang perdagangan secara online dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*)
- **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018,**  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/Menkes/Per/VII/2010**  
Tentang Izin Edar Alat Kesehatan
- **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018**  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2018**  
Tentang Perubahan Atas Permenkes No 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018
- **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018**  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
- *DLL ....*

# STRATEGI PEMAHAMAN



Sosialisasi



Pelatihan



Pendampingan



Bimbingan Teknis



*Workshop/FGD*



Konsultasi



Lainnya





# DAMPAK TIDAK MEMAHAMI ATURAN PBJ

- SDM PBJ tidak kompeten
- Proses PBJ menjadi bermasalah
- Pengambilan keputusan yang kurang tepat
- Rawan praktik KKN



- Tidak tercapai tujuan Pengadaan



- Tidak tercapai percepatan pembangunan

# Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa

V. 2019

